

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH
DI KABUPATEN PANGKEP**

**THE EFFECT OF FINANCIAL MANAGEMENT
ON THE PERFORMANCE OF THE LOCAL ECONOMY
IN THE DISTRICT PANGKEP**

Indah Yuliani Mone¹, H. Rahardjo Adisasmita², Mediaty²

*¹Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Pangkep,
²Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar*

Alamat Korespondensi :

Indah Yuliani Mone
Pemda Kabupaten Pangkep
HP : 081355246040
Email : nandaindah59@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Pangkep secara simultan dan parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan purposive sampling yaitu laporan target dan realisasi APBD dalam sepuluh tahun (2002-2011) dan nilai PDRB dalam sepuluh tahun (2003-2012). Analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS 20,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep. Secara parsial pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan, belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan, serta pembiayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebesar 99,0%, sedangkan sisanya sebesar 1,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar objek penelitian ini.

Kata kunci : pendapatan, belanja, pembiayaan, kinerja ekonomi

Abstract

Financial management implemented in an integrated system that is manifested in the budget each year is set by local regulations. The aim of the research is to identify and analyze the effect of financial management based on revenue, expenditure and financing regional areas of the Economic Performance Pangkep either simultaneously and partially. The populations of the research is the data budget realization report, balance sheet and notes to the financial statements Pangkep Government. Based on the existing population, the sample selected using purposive sampling targets and actual budget reports within ten years (2002-2011) and the value of GDP in ten years (2003-2012). Analysis of the data used is linear regression with SPSS 20.0. The results of the research indicate that the area of financial management based on revenue, expenditure and financing regional areas simultaneously positive and significant impact on economic performance Pangkep area. Revenue partially positive and significant impact, shopping areas and no significant positive effect, as well as regional funding and significant negative effect. Regional economic performance is affected by revenue, expenditure and financing local area by 99.0%, while the remaining 1.0% is influenced by other variables outside the research object.

Keywords: income, expenditure, financing, economic performance

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota (Bratakusumah, 2001 dalam Maryati, 2010). Mulyono (2006) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mardiasmo (2002) memberikan pengertian fungsi pengelolaan keuangan adalah menyangkut keputusan investasi, pembiayaan dan deviden untuk suatu organisasi. Fungsi-fungsi ini harus sama dilaksanakan dalam organisasi bisnis, bidang pemerintah, maupun organisasi-organisasi.

Otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri Menurut Oates (1993) dalam Sasana (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Menurut Halim (2004), pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Saragih (2003) dalam Sularso (2011) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Sidik (2000) dalam Maryati (2007),

menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) dalam Darwanto (2007) juga menyatakan menyatakan hal sama. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Belanja modal sangat erta kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) dalam Sularso (2011) menyatakan bahwa investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure*, yang didefenisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993) dalam Haryanto (2013), yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) dalam Haryanto (2013), mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Hines, 1995) dalam Lambut (2013).

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005) dalam Adi (2007). Lin dan Liu dalam Priyo (2006) dalam Setiyawati (2007) menyatakan bahwa belanja pembangunan merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut P. Eko Prasetyo (2009) dalam Haryanto (2013), istilah pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009 dalam Haryanto, 2013). Menurut Kuznet dalam Todaro (2003) dalam Sasana (2009) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro, 2004; Gaspersz dan Feonay, 2003). Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997 dalam Rustiono, 2008). Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Lincoln Arsyad, 1999 dalam Caska, 2008). Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa teori basis ekonomi yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.

Menurut Arsyad (1999) dalam Setiyawati (2007) bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National*

Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Susanti,dkk (2000) dalam Maryati (2010) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi daerah dengan meneliti sejauhmana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan salah satu bentuk instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah daerah, dengan memilih judul: Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *observasional* dengan menggunakan desain *cross sectional study*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta PDRB berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu laporan target dan realisasi APBD dalam kurun waktu tahun 2002 – 2011 serta PDRB dalam kurun waktu tahun 2003 – 2012.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi laporan keuangan daerah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*) yang digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengelolaan data menggunakan software SPSS 20.0.

HASIL

Karakteristik Sampel

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas dasar harga berlaku dan konstan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 2003-2012 sebesar 6,20 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada dari tahun 2003 hingga 2012 berfluktuasi dimana laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 yaitu 9,61% dan terendah pada tahun 2005 yaitu 5,59%. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 5.91%. Hal ini diperkirakan disebabkan karena imbas kenaikan BBM pada tahun tersebut. Tabel 2 memperlihatkan laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun 2002 – 2011 berdasarkan realisasi dan persentase pertumbuhan. Diperoleh persentase pertumbuhan pendapatan pemerintah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Persentase pertumbuhan terbesar mencapai 33,03% pada tahun 2008 dan persentase terkecil pada tahun 2004 hanya 2,68%. Berdasarkan realisasi dan persentase pertumbuhan untuk belanja daerah terlihat persentase pertumbuhan yang terendah adalah -0,47% pada tahun 2009 dan yang tertinggi adalah 65,41% pada tahun 2008. Sedangkan untuk pembiayaan daerah berdasarkan analisis olah data diperoleh realisasi pertumbuhan anggaran pembiayaan daerah mulai tahun 2002-2011 juga berfluktuasi.

Pengaruh Secara Simultan dan Parsial

Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Uji F mempunyai pengaruh signifikan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas kesalahan kurang dari 5% ($P < 0,05$). Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5%, maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh F_{hitung} sebesar 204,501 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan F_{tabel} pada taraf $\alpha = 0,05$ diperoleh 4,387. Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($204,501 > 4,387$) dan nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan memperhatikan nilai t_{hitung} dari hasil regresi dengan tingkat kepercayaan 95% atau pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} . Adapun metode dalam penentuan t_{tabel} menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan $df=n-k-1$ (pada penelitian ini $df=10-3-1=6$), sehingga diperoleh nilai t_{tabel} adalah 1,94 disajikan dalam Tabel 4. Berdasarkan nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel independen dibandingkan dengan nilai t_{tabel} diketahui bahwa nilai t_{hitung} dalam penelitian untuk pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah, belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah, sedangkan pembiayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep berdasarkan hasil koefisien regresi X_1 (pendapatan) sebesar 0,362 yang berarti bahwa jika X_1 (pendapatan) naik sebesar satu satuan, akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah sebesar 0.362 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya dilihat dari nilai signifikan dimana tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05 ($0,042 < 0,05$) serta nilai $t_{hitung} = 2,570$ dan $t_{tabel} = 1,943$, maka t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,570 > 1,943$) berarti variabel pendapatan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep.

Pengaruh positif dan signifikan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap kinerja ekonomi daerah menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa pendapatan daerah yang terbesar bersumber dari dana transfer pusat. Pengaruh positif dan signifikan pada dasarnya disebabkan oleh realisasi pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan lebih banyak bersumber dari dana transfer. Hasil ini adalah sesuai dengan legitimasi Keynes dengan rumusan $Y = C + I + G + X - M$, yang dapat dijabarkan menjadi $Y = C (Y \cdot T + Tr) + I + G + X - M$ yang berarti bahwa pendapatan transfer (Tr) yang bersumber dari dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian dan bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dianalogikan sebagai Y (PDB/Produk Domestik Bruto). Peneliti yakin dengan

kesimpulan ini, bahwa walaupun sebagian pendapatan transfer bersumber dari dana bagi hasil yang sesungguhnya adalah menjadi beban masyarakat, namun untuk daerah yang struktur perekonomiannya masih relatif tertinggal realisasi pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah pendapatan transfer pada umumnya masih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian yang murni bersumber dari pemerintah pusat, yang pada umumnya jauh lebih besar dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam dan pendapatan bagi hasil lainnya yang bersumber dari potensi daerah yang bersangkutan. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD hasil penelitian ini tidak sesuai dengan legitimasi Keynes dengan rumusan $Y = C + I + G + X - M$, yang dapat dijabarkan menjadi $Y = C(Y) + C(T) + I + G + X - M$ yang berarti bahwa pendapatan asli daerah yang dianalogikan sebagai T (*taxes/pajak*) secara regional berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi daerah yang dianalogikan sebagai Y (PDRB/Produk Domestik Regional Bruto). Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa apabila pemerintah daerah Kabupaten Pangkep ingin memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya, maka langkah dengan memacu peningkatan pendapatan asli daerah adalah tidak tepat, karena kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah akan dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan *output* industri secara umum. Sebaliknya, jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah *output*nya yang pada akhirnya akan dapat memacu meningkatnya kinerja ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil koefisien regresi X_2 (belanja) sebesar 0,060 yang berarti bahwa jika X_2 (belanja) naik sebesar satu satuan, akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah sebesar 0,060 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya dilihat dari nilai signifikan dimana tingkat signifikan lebih besar dari pada 0,05 ($0,686 > 0,05$) serta nilai $t_{hitung} = 0,425$ dan $t_{tabel} = 1,943$, maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,425 < 1,943$) berarti variabel belanja daerah (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian ini telah didukung oleh teori Keynes dengan rumusan $Y = C + I + G + X - M$, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan sebagai belanja daerah (*government expenditure*) yang disimbolkan sebagai G berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi daerah yang dianalogikan sebagai Y (PDRB/Produk Domestik Regional Bruto). Sedangkan pengaruh tidak signifikan disebabkan karena berdasarkan penjelasan

sebelumnya bahwa realisasi belanja daerah yang terbesar dialokasikan untuk belanja operasional yang didalamnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja daerah masih difokuskan pada belanja selain belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu dalam rangka memacu peningkatan kinerja ekonomi daerah, pemerintah kabupaten Pangkep harus lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran untuk pos belanja pembangunan. Belanja pembangunan merupakan jenis belanja yang menghasilkan nilai tambah aset baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan pada periode tertentu. Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dari sisi belanja, maka masing-masing daerah mempunyai prioritas pembangunan yang berbeda sehingga alokasi belanja pun berbeda. Melihat kinerja keuangan pemerintah kabupaten Pangkep dari sisi pengeluaran (belanja) ternyata alokasi belanja rutin (operasional) masih lebih besar daripada belanja pembangunan (modal). Kondisi ini jika dilihat dengan analisis ekonomi mengenai perilaku birokrat dalam pemerintahan sesuai dengan pandangan Weber yang dimodifikasi oleh Niskanen (Mangkorsoebroto, 1997 dalam Makrifah, 2010) yang menyatakan bahwa birokrat sebagaimana juga dengan orang lain adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya yaitu gaji, jumlah karyawan, reputasi dan status sosial.

Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil koefisien regresi X_3 (pembiayaan) sebesar -0,048 yang berarti bahwa jika X_3 (pembiayaan) naik sebesar satu satuan, akan berpengaruh terhadap menurunnya kinerja ekonomi daerah sebesar -0,048 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya dilihat dari nilai signifikan dimana tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05 ($0,010 < 0,05$) berarti variabel pembiayaan daerah (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila realisasi pembiayaan daerah meningkat maka akan menurunkan kinerja ekonomi daerah. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan

pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah secara simultan. Hasil perhitungan menunjukkan signifikan dengan $p < 0.05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Pendapatan daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah, sedangkan belanja daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah secara parsial. Akan tetapi semua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 99,0% variabel dependen yaitu kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pendapatan daerah (X_1), belanja daerah dan pembiayaan daerah, sedangkan sisanya sebesar 1,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Pemerintah Kabupaten Pangkep perlu menetapkan target anggaran keuangan yang tidak terlalu tinggi, sehingga realisasi pencapaian target mudah diterapkan sesuai dengan alokasi pos-pos anggaran keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu perlu mengalokasikan seluruh anggaran yang telah ditargetkan untuk direalisasikan sesuai dengan bagian-bagiannya dalam meningkatkan kegiatan pelayanan publik, yang dengan sendirinya pencapaian realisasi sesuai target yang ditetapkan untuk efektivitas pencapaian kinerja ekonomi daerah pada Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi,P.H.. (2007). *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol.8 No.1.
- Adisasmitha, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Caska. (2008). *Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah di Provinsi Riau*. Jurnal Industri dan Perkotaan Vol.XII, No.21/Februari 2008.
- Darmawanto. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol.8, No.1, Februari 2007, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Halim. (2004). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Haryanto,Tommy Prio. (2013). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. Economics Development Analysis Journal, ISSN 2252-6889, 2 (3) (2013).
- Lambut, Adventinus K. (2013). *Analysis Flypaper Effect Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol.4, No.1, Juni 2013.
- Makrifah. (2010). (Tesis). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. IPB. Bogor
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maryati. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.5, No.2, ISSN 1858-3687, hal. 68-84, Desember 2010
- Mulyono. (2006). *Audit Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rustiono, Dedi. (2008). (Tesis) *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*.
- Sasana, Hadi. (2009). *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10 No.1, Juni 2009, hal.103-124
- Setiyawati. (2007). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4, No.2, hal 211-228, Desember 2007.
- Sularso, Havid. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi Vol.1, No.2, ISSN 2088-2106, Agustus 2011.

Tabel 1. Perkembangan PDRB serta Pertumbuhan Ekonomi Kab.Pangkep

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2003	1.936,94	1.656,41	-
2004	2.145,41	1.758,99	6,19
2005	2.386,67	1.857,32	5,59
2006	2.735,86	1.967,63	5,94
2007	3.153,30	2.088,09	6,12
2008	3.826,20	2.237,50	7,16
2009	4.597,93	2.369,77	5,91
2010	5.379,30	2.519,98	6,34
2011	6.413,16	2.751,14	9,17
2012	7.676,58	3.015,46	9,61
Rata-rata			6,20

Tabel 2. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kab.Pangkep

Tahun	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan (%)	Realisasi Belanja	Pertumbuhan (%)	Realisasi Pembiayaan	Pertumbuhan (%)
2002	171.776.294.586,33	--	160.465.672.153,95	--	8.220.825.183,52	--
2003	212.412.783.466,23	23,66	200.135.878.469,00	24,72	-12.276.904.997,23	-249,34
2004	218.105.644.468,79	2,68	207.705.589.707,35	3,78	-10.400.054.761,44	-15,29
2005	241.586.549.241,83	10,77	233.726.958.884,89	12,53	-7.859.581.356,94	-24,43
2006	338.957.789.148,60	40,30	307.025.947.607,00	31,36	15.718.042.255,69	-299,99
2007	403.852.685.846,14	19,15	357.688.543.292,04	16,50	45.664.731.339,33	190,52
2008	537.230.219.280,26	33,03	591.660.237.168,64	65,41	90.400.352.338,07	97,97
2009	559.645.677.304,74	4,17	588.874.779.499,14	-0,47	52.357.158.229,88	-42,08
2010	605.414.545.744,52	8,18	615.967.074.794,16	4,60	29.069.056.404,80	-44,48
2011	723.945.311.593,68	19,58	649.842.832.428,80	5,50	-7.881.492.397,81	-127,11

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,348	3	0,116	204,501	,000 ^b
	Residual	0,003	6	0,001		
	Total	0,352	9			
a. Dependent Variable: Kinerja Ekonomi Daerah						
b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah						

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Model		B	t hitung	Sig.	Keputusan
1	(Constant)	-2,396	-5,423	0,002	
	Pendapatan Daerah	0,362	2,570	0,042	Hipotesis Diterima
	Belanja Daerah	0,060	0,425	0,686	Hipotesis Ditolak
	Pembiayaan Daerah	-0,048	-3,696	0,010	Hipotesis Diterima

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Squares	Adjusted R Squares	Std. Error of the Estimate
1	0,995	0,990	0,985	0,02383
a. Dependent Variable: Kinerja Ekonomi Daerah				
b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah				
Sumber : Hasil penelitian tahun 2013, data diolah				